

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 72 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN
HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan sehubungan dengan adanya standar satuan harga dan standar biaya umum yang sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasar yang berlaku di Kota Batu dan untuk mengakomodir beberapa komponen harga satuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 83 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN STANDAR SATUAN HARGA BARANG/JASA DAN STANDAR BIAYA UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 83 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa dan Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2020 yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Batu:

1. Nomor 96 Tahun 2019;
2. Nomor 17 Tahun 2020; dan
3. Nomor 26 Tahun 2020

diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Standar Satuan Harga Barang/Jasa dengan kode:

2.02	Alat Berat dan Pertukangan
2.02.003	Excavator
2.02.005	Elevator dan Escalator
2.02.007	Alat Bengkel Bermesin Perkakas Konstruksi Logam Terpasang
2.02.011	Peralatan Tukang
2.02.498	Perkakas Bengkel Listrik
2.02.500	Compaction Equipment

3.03	Peralatan dan Jaringan Komputer
3.03.013	Laptop/Notebook
3.03.014	Komputer Server
3.03.015	Software dan Hardware
3.03.017	Stavolt dan UPS
3.03.018	Printer
3.03.019	Hardisk dan Memory Card
3.03.021	Jaringan Komunikasi
3.03.022	Videotron
3.03.443	Peralatan Komputer dan Jaringan Lainnya
3.03.495	Smartphone
4.04	Alat Rumah Tangga
4.04.024	Alat Pendingin
4.04.025	Alat Dapur
4.04.428	Alat Kebersihan
4.04.429	Alat Rumah Tangga Lainnya
4.05	Alat Pemadam Kebakaran
4.05.029	Alat Pemadam Kebakaran
6.07	Perlengkapan Kantor
6.07.036	Alat Reproduksi Pengganda
6.07.048	Conference dan Sound System
6.07.053	Meubelair
6.07.055	Kursi
7.08	Peralatan Studio Visual
7.08.065	Camera Digital
7.08.076	Accessories
7.09	Alat Komunikasi
7.09.080	Alat Komunikasi Radio
8.10	Alat Kesehatan
8.10.081	Alat Kesehatan dan Non Alkes
8.10.082	Alat Kedokteran
8.10.084	Alat Laboratorium
8.10.085	Obat-Obatan Non E-Katalog
9.12	Pertanian
9.12.087	Bibit Tanaman
9.12.088	Hutan Kota
9.12.093	Bibit Bunga
9.12.094	Bibit Padi dan Palawija
9.14	Peternakan
9.14.098	Bibit Peternakan
9.14.435	Pakan Ternak
9.15	Bahan Organik Tanah dan Tanaman
9.15.102	Agensi Hayati
10.17	Alat Peraga Pendidikan Non Formal
10.17.452	BHP Bahan Praktek dan Percontohan
11.18	Bahan Habis Pakai Alat Tulis Kantor
11.18.130	Aneka Kertas

11.18.132	Map
11.18.404	Benda Pos
11.18.423	Seminar Kit
12.19	Bahan Habis Pakai Bahan Cetak
12.19.145	Bahan Cetak
12.19.156	Cetak Digital
12.19.573	Cetak Peneng Perijinan
13.20	Bahan Pakaian Dinas Pegawai
13.20.159	Aksesoris Pakaian Dinas
13.20.446	Pakaian Kerja Lapangan
13.89	Bahan Pakaian Non Dinas
13.89.542	Bahan Pakaian Non Dinas
14.21	Kesenian Modern
14.21.180	Microphone
15.26	Peralatan Kebersihan
15.26.209	Peralatan Kebersihan
15.26.213	Perlengkapan
16.27	Sewa, Pemeliharaan dan Perbaikan
16.27.259	Personal Komputer
16.27.264	Tanaman Hias dan Kebersihan
16.22.272	Sewa Stand dan Dekorasi
17.60	Kendaraan
17.60.470	Kendaraan Roda 4
17.60.524	Kendaraan Roda 3
18.29	Bahan Bangunan
18.29.287	Batu Bata dan Beton Block
18.29.291	Kayu Meranti
18.29.308	Atap seng/Asbes/Talang
18.29.311	Alat-Alat Penggantung
18.29.353	Instalasi Listrik
18.29.354	Lain-Lain
18.29.402	Harga Satuan ASB Fisik
19.30	Peralatan dan Perlengkapan Dinas Perhubungan
19.30.361	Rambu
19.30.366	Traffic Cone dan Patok Tikungan
19.30.367	Perlengkapan PJU
19.30.432	Perlengkapan Dinas Perhubungan
20.31	Alat dan Bahan Pertanian
20.31.369	Alat/Mesin Pengolah Hasil Pertanian/Perkebunan
20.31.370	Alat/Bahan Pengendali Hama
20.31.454	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan
20.33	Obat-Obatan Hewan
20.33.376	Multivitamin dan Mineral
20.33.377	Diuretik, Analgesik, Antiperik dan Antibloat
20.33.382	Bahan Kimia Lain

20.33.383	Sarana dan Prasarana
20.33.387	Alat-alat Laboratorium dan Bahan-Bahan Kimia Laboratorium
20.55	Peralatan Hewan
20.55.462	Alat Kesehatan Hewan/Ternak
20.55.466	Kandang Hewan/Ternak
21.34	Alat Laboratorium
21.34.388	Alat Penguji Udara
32.35	Jasa Konsultasi Badan Usaha
32.35.405	Jasa Konsultasi Badan Usaha
33.36	Obat-Obatan
33.36.406	Obat Generik
33.37	Perbekalan Kesehatan
33.37.408	Perbekalan Kesehatan
35.39	Peralatan dan Perlengkapan BPBD
35.39.421	Peralatan BPBD
35.39.538	Perlengkapan BPBD
35.87	Pakaian BPBD
35.87.535	Pakaian BPBD
37.41	Makanan dan Minuman
37.41.426	Makanan dan Minuman
45.67	Harga Satuan Bangunan PAUD
45.67.552	Pengadaan Barang

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Lampiran II Standar Biaya Umum dengan kode:

1.04	Pengelola Sistem Informasi
1.04.391	Administrator Sistem Informasi Pengawasan
1.19	Honorarium Lain-Lain
1.19.056	Honorarium lain-lain
1.19.257	Tim Terpadu Fasilitasi dan Koordinasi Konflik sosial (FORKOPIMDA)
1.19.288	Honorarium Satgas URC Sosial
1.82	Honorarium Tenaga Kontrak/Honorar Daerah/Tenaga Harian Lepas
1.82.263	Honorarium Tenaga Outsourcing/Tenaga Harian Lepas
2.67	Dokumentasi Video
2.67.193	Biaya Pembuatan Film/Video
7.44	Tenaga Pendukung
7.44.109	Computer Operator/Typist
7.46	Tenaga Ahli

7.46.130	Tenaga Ahli Muda (Pengalaman 5-8 Tahun)
----------	---

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 72/A